

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat majemuk, yaitu, yang terdiri atas masyarakat multietnik. Sehingga, dari kemajemukan masyarakat tersebut akan menghasilkan sebuah tatanan kemasyarakatan yang heterogen. Dalam masyarakat Indonesia, setiap masyarakat yang mempunyai keberagaman etnis mempunyai hak untuk menempati wilayah sebagai tempat hidupnya yang diakui sebagai hak wilayahnya dan merupakan tempat sumber daya di mana masyarakat tersebut memanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 dan pada Pasal 32 Ayat 1. Pasal 28E Ayat 1, yaitu, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 32 Ayat 1, Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Sebagai masyarakat majemuk (*plural society*) yang terdiri dari aneka ragam suku bangsa dengan memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, tentunya harus ditanamkan nilai-nilai kebersamaan serta rasa Nasionalisme yang tinggi di dalam masyarakat, sehingga, akan menciptakan “keserasian sosial” masyarakat itu sendiri.

Ciri utama masyarakat majemuk (*plural society*) adalah orang yang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial mereka terpisah-pisah dan tidak bergabung dalam sebuah unit politik. Sebagai seorang sarjana yang untuk pertama kali menemukan istilah ini, Furnivall menunjuk masyarakat Indonesia di zaman kolonial sebagai contoh yang klasik. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu terpisah-pisah, tidak saja antara kelompok yang memerintah dan yang diperintah dipisahkan oleh ras yang berbeda, tetapi secara fungsional masyarakatnya terbelah dalam unit-unit ekonomi, antara pedagang Cina, Arab, dan India (*Foreign Asiatic*) dengan kelompok petani Bumi Putera. Menurut Furnivall, masyarakat dalam unit-unit ekonomi ini hidup menyendiri (*exclusive*) pada lokasi-lokasi pemukiman tertentu dengan sistem sosialnya masing-masing<sup>1</sup>.

Belakangan ini masalah tentang masyarakat majemuk (*plural society*) masih belum menemukan titik penyelesaian, bahkan sudah menjadi isu-isu Nasional dan ramai dibicarakan baik dalam seminar-seminar nasional tentang etnis maupun dalam diskusi-diskusi kecil. Kasus-kasus kerusuhan etnis semakin mengiringi perjalanan kehidupan Bangsa Indonesia, dan Bangsa-bangsa yang ada di dunia.

Bhineka Tunggal Ika merupakan pernyataan simbolis Bangsa Indonesia mengenai keanekaragaman kebudayaannya. Arti harafiah dari kalimat ini adalah “berbeda tetapi satu”. Namun makna simbolis yang terdapat pada Burung Garuda sebagai Lambang Negara, memberikan arti Indonesia dibangun oleh keanekaragaman suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Keragaman

---

<sup>1</sup> Lihat Furnivall (1940), dalam Usman Pelly (2005), *Pengukuran intensitas konflik dalam Masyarakat majemuk.*” Dalam Jurnal Antropologi Sosial Budaya, Vol. 01. 2 Oktober 2005. Hlm. 53

kebudayaan masyarakat Indonesia juga tercermin dalam berbagai bentuk kebudayaan, baik yang bersifat tak benda (*intangible*) seperti nilai, konsep dan gagasan, maupun yang bersifat bendawi yakni berupainggalan purbakala seperti Candi, Rumah Adat, Kain Tenun dan sebagainya<sup>2</sup>.

Keberagaman etnis yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan simbol kekayaan akan budaya. Sehingga, perlu kehati-hatian dalam menjaga keharmonisan hubungan antar etnis tersebut, agar dapat menciptakan tatanan kemasyarakatan yang integratif dan dinamis, sebagaimana yang dicita-citakan oleh makna yang tertuang dalam *Bhineka Tunggal Ika*. Akan tetapi, kemajemukan etnis tersebut dapat menghasilkan konflik apabila keberagaman tersebut tidak ditopang dengan sikap yang bijaksana dari setiap individu dan masing-masing individu hanya mengedepankan keakuan budaya (*Ego Culture*). Sehingga, yang muncul kemudian adalah prasangka sosial yang hanya menghasilkan disintegrasi sosial.

Upaya untuk memahami keanekaragaman suku-bangsa dan kebudayaan di Indonesia adalah sekaligus berpretensi pula mengungkapkan berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi di kalangan suku-bangsa yang saling berbeda kebudayaannya. Dengan mempelajari proses interaksi sosial yang terjadi, sekaligus diharapkan akan memberikan pengetahuan tentang proses-proses sosial di kalangan mereka. sehingga, akan diketahui segi dinamis dari masyarakat dan kebudayaan. Berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat yang merupakan segi dinamis adalah akibat interaksi sosial yang terjadi di antara paraarganya,

---

<sup>2</sup> S. Dloyana Kusumah, (2007), *Pengelolaan Keragaman Budaya: Strategi Adaptasi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan. Jakarta. Hlm. 2

baik orang perorangan, orang dengan kelompok maupun antar kelompok manusia<sup>3</sup>.

Ruang publik di mana perbedaan antar etnis mengalami pengikisan dalam proses pembauran di suatu ruang publik. Dalam satu ruang publik tertentu, berbagai etnis belajar berkomunikasi dengan cara yang lebih dapat diterima secara umum dan setiap etnis belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kelompok lain<sup>4</sup>.

Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Dalam keadaan demikian, kita diharapkan kepada masalah-masalah yang ada dimana suatu pesan disandi dalam suatu budaya dan harus disandi balik dalam budaya lainnya<sup>5</sup>.

Komunikasi antar budaya dianggap perlu dalam menciptakan suatu keharmonisan dalam suatu masyarakat yang mempunyai keragaman etnis, sehingga, antara satu budaya saling memahami dan mengerti keadaan sesama dan mampu menerima segala perbedaan di antara kelompok budaya lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam suatu wilayah yang memiliki keragaman etnis akan ada persaingan di antara etnis tersebut, dan dalam persaingan perlu adanya interaksi sosial yang harmonis dengan didasari oleh komunikasi antar budaya,

---

<sup>3</sup> Poerwanto, Hari, (2006). Makalah Hubungan Antar Suku-Bangsa Dan Golongan Serta Masalah Integrasi Nasional, makalah dalam Focus Group Discussion (FGD) "*Identifikasi Isu isu Strategis yang Berkaitan dengan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa*", dilaksanakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2006. Hlm. 2

<sup>4</sup> S. Dloyana Kusumah. *Ibid.* hlm, 6

<sup>5</sup> Lihat Deddi Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (1998), *Komunikasi Antarbudaya (Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang Berbeda Budaya)*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Hlm. 20

karena komunikasi antar budaya dianggap penting dalam suatu masyarakat yang multi-etnik agar tidak mengarah kepada konflik etnis seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Konflik tersebut diakibatkan baik oleh perbedaan pendapat maupun kesalahpahaman dalam berkomunikasi.

Konflik antar etnis banyak terjadi di berbagai tempat, mulai dari konflik yang skala kecil, sampai konflik yang berskala besar. Adapun konflik tersebut hanya terjadi dalam waktu yang singkat tetapi ada juga yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Dalam pengelolaan kemajemukan tersebut yang sangat terpenting adalah proses interaksi dalam kehidupan masyarakat majemuk. Seperti yang akan diutarakan oleh Usman Pelly di bawah ini.

Kerusuhan antar etnis berakar dari kesenjangan sosial ekonomi dan merupakan potensi budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan dihancurkan. Kesenjangan itu adalah hasil rekayasa *class forming* rezim pemerintah Orde Baru yang menempatkan kelompok etnik pendatang tertentu pada lapisan menengah dalam proses pembentukan piramida sosial masyarakat setempat<sup>6</sup>. Dengan menggunakan analisis kebudayaan dominan dari Edward Bruner secara implisit bahwa pola-pola penyesuaian diri kaum migran di Ambon dan Sambas, telah melanggar aturan main atau konvensi sosial yang dibangun di atas landasan kebudayaan dominan komunitas setempat<sup>7</sup>. Sementara itu, Yunus Melalatoa, dalam S. Dloyana Kusumah, (2007), mencatat bahwa di Indonesia kurang lebih 500 suku bangsa,

---

<sup>6</sup> Lihat Usman Pelly, (1999), dalam Julkifli B. Lubis, (2005), "*Kanalisasi ketegangan etnik dan kompetisi budaya dalam sektor publik.*" Dalam Jurnal Antropologi Sosial Budaya, Vol. 01. 2 Oktober 2005. Hlm 61

<sup>7</sup> Julkifli B. Lubis. *Op. cit.* hlm, 61

dengan mendukung corak tradisinya masing-masing walaupun dari unsur-unsur budaya yang dimiliki, suku bangsa tersebut banyak ada yang sama tetapi ada pula yang berbeda, bahkan ada yang bertolak belakang antara satu suku dengan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan masalah budaya, yang tidak sama apalagi yang bertolak belakang inilah yang harus diperhatikan agar tidak terbentuk *stereotype* yang negatif.

Sesungguhnya eksistensi suatu etnis menempati suatu wilayah masing-masing mempunyai sejarah tersendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola interaksi antara etnis pendatang yang baru pindah ke satu wilayah dengan etnis lain yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut, status mereka sama-sama pendatang. Dinamika yang akan terjadi adalah secara otomatis pendatang yang sudah lama bermukim di wilayah tersebut, akan melakukan pola-pola interaksi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku wilayah tersebut.

Konflik Sampit, Sambas tahun-tahun sebelumnya hingga Tarakan antara Melayu\_Dayak Tidung dan Bugis beberapa bulan terakhir adalah kategori bencana sosial. Salah satu indikatornya adalah konflik yang melibatkan entitas etnis dalam jumlah yang relatif besar dan berpotensi mengundang gerakan bencana sosial yang lain, di kawasan yang lain pula. Beberapa konflik besar di Kalimantan melibatkan interaksi antar entitas etnis yang berbeda sesuai dengan kompetitif kepentingan yang mengemuka di kawasan masing-masing. Jika Sambas Kalimantan Barat, dan Sampit Kalimantan Tengah, ditengara konflik

antara penduduk asli dan pendatang ( Dayak-Melayu dan Madura), konflik yang terjadi di Tarakan demikian pula adanya<sup>8</sup>.

Dalam hemat penulis, konflik yang sering terjadi diberbagai daerah seperti yang dijelaskan di atas, hanyalah merupakan pertentangan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas yang menekankan adanya penyesuaian diri yang dilakukan oleh kaum minoritas, terhadap kebudayaan kaum mayoritas artinya kelompok minoritas yang menjadi warga pendatang dalam suatu wilayah yang memiliki kebudayaan mayoritas dengan otomatis harus mengikuti kebudayaan dari kaum mayoritas tersebut. Sehingga, yang akan terjadi kemudian adalah proses asimilasi, yaitu penyesuaian diri oleh kelompok pendatang dengan kebudayaan kelompok mayoritas.

Kelompok-kelompok etnik Pribumi yang ada di Sumatera Utara seperti Angkola, Karo, Mandailing, Melayu, Nias, Pakpak, Simalungun, Toba dan lain lain, yang pada masa lalu menempati suatu wilayah teritorial tertentu yang relatif jelas batas-batasnya dengan segala kelengkapan dan ekspresi kebudayaannya, bisa digolongkan sebagai contoh kelompok etnik berdasarkan definisi klasik tadi. Bagaimana kelompok etnik yang berbudaya homogen tersebut menyikapi kehadiran orang luar etniknya yang berkepentingan masuk ke wilayah teritorial mereka?. Setiap kelompok etnik telah mengembangkan suatu mekanisme budaya untuk mengakomodasi hal itu, dan sesungguhnya hampir semua kelompok etnik dalam pengertian klasik tadi membuka diri untuk masuknya orang luar. Syaratnya

---

<sup>8</sup> Lihat Taufik Arbain (2010),di dalam Makalahnyapada Seminar “Keberagaman Etnik Sebagai Sumberdaya Dalam Membangun Kerekatan Sosial”, Tanjung, 22 Desember 2010

orang luar tersebut bersedia mengikuti aturan main yang berlaku dalam komunitas setempat. Karena di sini ada kebudayaan dominan (*dominant culture*)<sup>9</sup>.

Syarat atau proses adaptasi tersebut merupakan salah satu penekanan kepada proses asimilasi, dalam proses tersebut penduduk yang mayoritas selalu membuka diri atas kehadiran daripada etnis-etnis pendatang untuk bertempat tinggal atau beradaptasi di suatu wilayah, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh etnis pendatang agar etnis tersebut dapat diterima di kalangan masyarakat yang mayoritas atau dominan. Salah satu persyaratan tersebut adalah etnis pendatang harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat dominan tersebut, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh etnis pendatang secara otomatis akan hilang dan masyarakat minoritas akan mengikuti kebudayaan kaum mayoritas. Penjelasan tersebut dipertegas oleh Koentjaraningrat.

Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada: (1) golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, (2) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga, (3) kebudayaan-kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya golongan-golongan yang tersangkut dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan yang mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Dalam hal itu golongan-golongan minoritas itulah yang merubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya, dan menyesuaikan dengan

---

<sup>9</sup> Lihat Zulkifli B. Lubis. *Ibid.* hlm, 63



kebudayaan dari golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga, lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaannya, masuk ke dalam kebudayaan mayoritas<sup>10</sup>.

Dalam rangka upaya menuju integrasi nasional Indonesia yang kuat maka aneka warna suku-bangsa di Indonesia itu saling berinteraksi, dan Sebagai konsekwensi dari suatu interaksi sosial yang timbul maka seringkali muncul gambaran subyektif mengenai suku-bangsa lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu suku-bangsa tertentu sehari-harinya dijumpai gambaran subyektif mengenai suku-bangsa lain atau yang lazim disebut dengan stereotipe etnik. Sementara ini stereotipe etnik, tidak selalu berupa gambaran yang bersifat negatif (akan tetapi biasanya ini yang sering muncul) melainkan ada kalanya pula gambaran yang bersifat positif. Ada penilaian bahwa stereotipe etnik yang negatif akan menghambat interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat yang multietnik, yang pada gilirannya akan dapat pula menyebabkan terhambatnya proses menuju integrasi Nasional. Akhirnya, suatu integrasi adalah mengandung kendala psikologis, antara lain berkaitan dengan tingkat kepuasan tertentu dari suatu suku-bangsa atau golongan. Oleh karenanya dalam suatu upaya mewujudkan integrasi, muncul pandangan yang menilai apakah itu suatu *agreement* (permutakatan) ataukah *congruency* (penyesuaian), terutama yang berkaitan apakah sentripetal ataukah sentrifugal. Apabila terjadi *disagreement* atau *discrepancy* (ketidaksesuaian) maka berarti kelompok superordinat menang atas kebijaksanaan yang bersifat sentripetal; padahal kelompok subordinat lebih menghendaki yang

---

<sup>10</sup> lihat Koentjaraningrat (2002), *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT Rineka Cipta: Jakarta. Hlm. 225

bersifat sentrifugal. Jika hal ini terjadi maka akan timbul konflik yang menyebar luas<sup>11</sup>.

Sejak manusia bergabung dalam suatu masyarakat, agaknya keselarasan sudah menjadi suatu kebutuhan. Betapa tidak, pada waktu pengalaman mengajari manusia bahwa hidup bermasyarakat jauh lebih menguntungkan, efisien, dan efektif daripada bila hidup sendirian. Pada waktu itu pula manusia belajar menenggang dan bersikap toleran terhadap yang lain. Pada waktu dia tahu bahwa untuk menjaga kelangsungan hidupnya dia membutuhkan kerja sama dengan orang banyak yang kemudian mengikat diri dalam masyarakat, manusia juga belajar memahami suatu keajekan pola kerja sama yang terdapat dalam hubungan antara anggota masyarakat tersebut. Usaha untuk menjaga keselarasan itu terjabarkan dalam sistem nilai yang akan sangat menekankan hubungan yang akan sejauh mungkin untuk menghindari konflik, pada penajaman naluri untuk mau terus berada dalam kebersamaan dan saling membentuk dalam pekerjaan<sup>12</sup>.

Keharmonisan atau keselarasan hidup dalam bermasyarakat, merupakan suatu cara hidup yang mengarah pada keserasian sosial hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain karena tidak bisa dinafikan bahwa seseorang membutuhkan bantuan orang lain dalam melaksanakan aktivitas untuk kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa hidup tanpa orang lain, misalnya gotong-royong dalam kegiatan acara pernikahan, kebersihan lingkungan, bercocok tanam, dan acara-acara keagamaan. Acara-acara

---

<sup>11</sup> Hari Poerwanto. *Op. cit*, hlm. 2

<sup>12</sup> Lihat Umar Kayam dan Nat J. Colletta, (1987). *Kebudayaan dan Pembangunan (Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia)*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. Hlm. 101

tersebut sangat membutuhkan tenaga orang lain untuk mengerjakannya agar bisa terlaksana dengan baik.

Keserasian sosial merupakan salah satu cara dalam menciptakan suatu integrasi sosial terhadap kehidupan masyarakat yang memiliki beragam etnik. Dalam masyarakat yang mempunyai keragaman etnik sikap menerima masuknya suatu budaya adalah yang paling penting, sehingga tidak akan timbul sikap keegoisan budaya dan akan melahirkan suatu kesepakatan sosial didalam bermasyarakat. Sikap menerima suatu budaya tidak serta merta seluruhnya diterima minimal, menerima sesuatu yang dapat menguntungkan dan menolak apa yang mereka rasa merugikan seperti yang terdapat dalam proses akulturasi budaya, tetapi dalam penerimaan budaya sering terjadi gejolak misalnya ada sebagian orang yang mau menerima budaya Pribumi, ada juga sebagian yang tidak bersedia untuk menerimanya.

Pola-pola akulturasi tidaklah seragam di antara individu-individu tetapi beraneka ragam, pada potensi yang dimiliki oleh imigran sebelum bermigrasi. Sebagian orang lebih menerima budaya Pribumi daripada sebagian orang lainnya. Dari sekian banyak faktor, faktor-faktor berikut dianggap penting dalam member andil dalam potensi akulturasi yang besar. *Kemiripan* antar budaya asli (imigran) dan budaya Pribumi mungkin merupakan faktor terpenting yang menunjang potensi akulturasi. Seorang imigran dari Kanada ke Amerika Serikat, misalnya, akan mempunyai potensi akulturasi yang lebih besar daripada seorang migran Vietnam dari Asia Tenggara<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (1998). *Ibid.* hlm, 144

Dari beberapa pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian tentang “Keserasian Sosial Hubungan Antar Etnis”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola pengelolaan dalam menghasilkan keserasian sosial di masyarakat yang heterogen seperti yang terjadi di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Keragaman etnis yang ada di Desa Banuroja merupakan bukti nyata bahwa Indonesia dibangun oleh keanekaragaman suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda, baik dari segi adat istiadat, agama, etnis, dan bahasa. Sehingga, ini merupakan sebuah bukti akan kekayaan budaya Bangsa Indonesia.

Nama Banuroja di angkat dari singkatan nama-nama suku yang dominannya yang tinggal di desa Banuroja Yaitu: “ Suku **B**Ali, **N**Usa Tenggara Barat, **G**o**R**Ontalo, dan **J**Awa”. Desa Banuroja adalah sebuah lokasi, tempat bermukimnya masyarakat yang didatangkan oleh Pemerintah melalui Program Transmigrasi yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia dan penduduk asli daerah sebagai transmigran lokal, yang kemudian ditempatkan di daerah ini, dengan kondisi alam yang masih sangat sulit untuk dikelola sebagai tempat mencari nafkah. Akibatnya, banyak penduduk yang akhirnya memilih kembali ke daerah asal, namun banyak pula yang memilih bertahan tinggal di tempat ini hingga saat ini daerah tersebut menjadi sebuah Desa Definitif yang bernama Desa Banuroja. Desa Banuroja, merupakan Miniatur Indonesia, karna selain dihuni oleh sekian banyak suku dan banyak agama.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dikutip dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Desa) Banuroja*. Data tersebut diperoleh dari Kantor Desa Banuroja

Dalam masyarakat yang mempunyai keragaman etnik dan agama, sangat potensial terhadap konflik sosial. Sederetan realitas yang terjadi di beberapa daerah yang rawan konflik, merupakan potret buram dari konstruksi keragaman masyarakat Indonesia. Remediasi terhadap dendam akibat konflik, sangat lama untuk dapat diredam, sehingga mengakibatkan luka yang berkepanjangan antara masyarakat yang berselisih. Banyak premis yang berkembang saat ini, bahwa dalam masyarakat yang heterogen, sangat besar potensi konflik, dan sampai saat ini, belum ditemukan desain spesifik untuk dijadikan resolusi dari konflik yang terjadi di beberapa daerah. Jika kita tengok, konflik antar etnik maupun agama, selalu mewarnai setiap lembaran-lembaran sejarah perjalanan bangsa ini. Bahkan hingga saat ini, belum menemukan titik temu penyelesaian. Masyarakat yang ada di Banuroja, merupakan salah satu dari sederetan realitas masyarakat yang heterogen, yang juga, sering diterpa dan diombang-ambing oleh gelombang disintegrasi sosial. Namun kemudian, yang menjadi pertanyaan “apakah Banuroja juga menapaki jalan setapak yang penuh dengan duri-duri perselisihan antar masyarakat, sebagaimana jalan yang telah dilalui oleh beberapa daerah yang rawan dengan konflik?

Inilah fenomena unik yang terjadi di wilayah Banuroja. Keadaan masyarakat Banuroja yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda, sudah barang tentu akan melalui jalan setapak yang penuh dengan gejolak dalam masyarakat. Banyak gejolak yang terjadi dalam masyarakat Banuroja, yang dapat berimplikasi pada disintegrasi masyarakat, karena inilah konsekuensi hidup dalam masyarakat yang berlatar belakang berbeda. Meskipun, gejolak yang terjadi pada

masyarakat tersebut tidak merambah pada konflik sosial seperti, di beberapa wilayah. Fenomena inilah yang menurut hemat penulis, sangat unik untuk diteliti, sekaligus memberi inspirasi terhadap penulis untuk melakukan penelitian mendalam, tentang bagaimana konstruksi gagasan dan desain spesifik yang dilakukan oleh masyarakat Banuroja, sehingga gejolak yang berpotensi pada konflik sosial tersebut mudah diredam, sebaliknya konstruksi keragaman malah membuat masyarakat yang hidup di wilayah tersebut hidup rukun, saling menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada. Pengelolaan keharmonisan inilah, yang sangat efisien untuk dijadikan cermin sekaligus kompas untuk menemukan jalan perdamaian yang harus dilalui oleh masyarakat multikultural.

Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang akan penulis cantumkan dalam tulisan ini, yakni penelitian yang relevan dengan apa yang menjadi permasalahan penulis, antara lain Penelitian tentang *Kerukunan Di Pura Eka Dharma Kasihan Bantul* (Studi Kerukunan Multikultural), yang disusun oleh Susanti.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor perekat yang menyebabkan kerukunan multikultural di lingkungan Pura Eka Dharma, antara lain: pemahaman dan pengalaman masing-masing agama, melaksanakan dialog umat beragama, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, kondisi sosial dan ekonomi yang stabil, pendidikan. Peran Pura Eka Dharma demi menciptakan kerukunan multikultural: forum pertemuan pemuka agama, pembentukan kader kerukunan umat beragama, membina dan memupuk sikap yang rukun.

Kemudian Penelitian tentang Komunikasi Antar EtnisTionghoa – Banjar – Jawa (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kampung Dalem Kota Tulungagung), yang disusun oleh Efi Arya Nofita.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada masyarakat dari ketiga etnis yang berbeda tersebut, yakni Etnis Tionghoa, Etnis Banjar, dan Etnis Jawa dalam berkomunikasi selalu memperhatikan latar belakang dari lawan bicara serta berusaha untuk menjaga keharmonisan. Disini, terdapat pola komunikasi di mana ketiga etnis yang berinteraksi tersebut membentuk suatu Komunikasi empatik yang bersifat lebih toleran terhadap pluralisme masing-masing etnis. Kemudian dapat dirumuskan faktor-faktor pendukung dan penghambat pola komunikasi antara budaya Tionghoa, Banjar, dan Jawa di Tulungagung. Dimana Faktor pendukung yaitu :

- (a) Persamaan letak tempat tinggal ;
- (b) Toleransi;
- (c) Kesadaran akan perbedaan ;
- (d) Kemauan untuk Membaur ; dan
- (e) Bahasa Komunikasi yang sama .

Dari berbagai penjelasan di atas tentang gejala masyarakat yang heterogen, membuat penulis berkeinginan untuk meneliti tentang bagaimana pola pengelolaan keserasian sosial oleh masyarakat multietnik di Banuroja yang dalam kehidupan keseharian mereka tidak terjadi konflik, tetapi, yang terjadi ialah keharmonisan hidup bermasyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk mengkaji lebih mendalam masalah ini, maka peneliti mencoba mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas, antara lain: Bagaimana pola pengelolaan keserasian sosial dalam masyarakat multietnik di Banuroja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan capaian yang diinginkan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan sebagai berikut: Tujuan dari diadakannya penelitian yakni, untuk mengetahui proses pengelolaan keserasian sosial dalam masyarakat multietnik di Banuroja?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

**1.4.1** Manfaat pertama untuk masyarakat yaitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam memahami keserasian sosial yang ada di masyarakat yang multietnik.

**1.4.2** Manfaat kedua untuk Alamamater yaitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap seluruh elemen Intelektual yang ada dalam Atmosfir Akademik Universitas Negeri Gorontalo khususnya di Program Studi Sosiologi, terutama harapan agar penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi.



**1.4.3** Manfaat ketiga untuk diri sendiri yaitu, diharapkan agar penelitian ini dapat menambah wawasan diri sebagai kaum intelektual yang peka dengan masalah-masalah sosial di masyarakat.